

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA POTENSI KOTA PALU

Veny Nur Momi Sakina^{1*}, Dewi Cahyawati Abdullah², Irma Suriyani³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

14-05-2026

Disetujui:

20-07-2026

Dipublikasi:

02-08-2026

Kata Kunci:

*Implementasi Kebijakan;
Kurikulum Merdeka;
Sekolah Menengah
Kejuruan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi internal, meskipun pemahaman teknis guru masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, jumlah tenaga pendidik telah memadai, tetapi kompetensi guru serta sarana dan prasarana pembelajaran masih memerlukan penguatan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang positif terhadap implementasi kebijakan, sedangkan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kurikulum melalui pembagian tugas yang jelas, meskipun fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika dunia kerja. Perubahan lingkungan global menuntut sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar memperkenalkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal (Rahayu et al., 2022).

Keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Dalam perspektif

implementasi kebijakan, suatu kebijakan akan mencapai tujuan apabila didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten (Edwards III, 1980). Dengan demikian, implementasi menjadi tahapan yang menentukan apakah tujuan Kurikulum Merdeka dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran di sekolah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan. Rahayu et al. (2022) menemukan bahwa keberhasilan implementasi di Sekolah Penggerak dipengaruhi oleh kesiapan sekolah, kemampuan guru, dan dukungan pemangku kepentingan dalam menerapkan paradigma pembelajaran yang baru. Penelitian Fatah (2023) pada Sekolah Menengah Kejuruan menunjukkan bahwa kesiapan guru merupakan faktor penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap perangkat pembelajaran dan perubahan pendekatan pembelajaran. Sementara itu, Mujab et al. (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi guru masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah. Penelitian Sasmitha et al. (2023) juga menunjukkan bahwa implementasi kurikulum pada tingkat sekolah kejuruan memerlukan peningkatan kapasitas guru dalam menyusun modul ajar, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, serta mengembangkan asesmen yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai implementasi Kurikulum Merdeka, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada kesiapan guru, pengembangan perangkat pembelajaran, atau pelaksanaan kurikulum pada mata pelajaran tertentu. Kajian yang menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka menggunakan perspektif implementasi kebijakan Edward III, khususnya pada sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Palu, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sekolah kejuruan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi vokasional memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas praktik, serta koordinasi organisasi sekolah.

SMK Bina Potensi Kota Palu merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan nasional di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, implementasi kurikulum telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan guru, dan penyusunan perangkat pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain pemahaman teknis guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, serta perlunya penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan perhatian agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu menggunakan perspektif implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka sekaligus menjadi masukan bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu berdasarkan pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara komprehensif sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di SMK Bina Potensi Kota Palu. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Informan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, seperti perangkat pembelajaran, dokumen sekolah, serta dokumentasi kegiatan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles et al. (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (conclusion drawing), dan verifikasi (verification). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, serta mengorganisasikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan yang terus diverifikasi melalui proses penelaahan ulang terhadap seluruh data sehingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu dengan menggunakan empat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik, diperoleh temuan sebagai berikut.

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi, workshop, rapat internal, serta penyampaian informasi oleh kepala sekolah kepada guru. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka beserta mekanisme pelaksanaannya di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses penyampaian informasi telah berlangsung secara berjenjang dan melibatkan seluruh tenaga pendidik. Guru memperoleh informasi mengenai perubahan kurikulum melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan maupun melalui forum internal sekolah. Selain itu, kepala sekolah secara aktif melakukan koordinasi untuk memastikan setiap guru memperoleh informasi mengenai kebijakan yang sedang diterapkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa guru masih mengalami kesulitan dalam

memahami aspek teknis pelaksanaan Kurikulum Merdeka, terutama berkaitan dengan penyusunan modul ajar, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan pelaksanaan asesmen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah terlaksana, tetapi pemahaman terhadap substansi kebijakan masih memerlukan penguatan melalui pendampingan yang lebih intensif.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu terdiri atas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan pelatihan bagi tenaga pendidik. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah tenaga pendidik dinilai telah mencukupi untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Meskipun jumlah guru relatif memadai, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka masih memerlukan peningkatan. Beberapa guru mengaku masih membutuhkan pelatihan lanjutan agar lebih memahami penyusunan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran berbasis proyek, serta sistem penilaian yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka.

Selain sumber daya manusia, penelitian juga menemukan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada kegiatan praktik kejuruan. Keterbatasan fasilitas tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka.

3. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu tergolong baik. Kepala sekolah maupun guru menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut serta berupaya menyesuaikan proses pembelajaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, para guru memberikan respons positif terhadap penerapan Kurikulum Merdeka karena dinilai memberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah secara aktif memberikan motivasi dan dukungan kepada guru agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pendidikan.

Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan teknis, sikap positif dan kemauan untuk terus belajar menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Hal tersebut terlihat dari partisipasi guru dalam mengikuti pelatihan, workshop, maupun kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah berjalan dengan cukup baik. Sekolah telah memiliki pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Koordinasi antar unsur sekolah dilakukan melalui rapat rutin dan mekanisme komunikasi internal sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian peran tersebut memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih belum berjalan secara optimal. Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi

guru selama proses implementasi sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih efektif.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berlangsung pada seluruh indikator implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun demikian, efektivitas implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai kendala pada aspek teknis pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran di tingkat sekolah (Edwards III, 1980).

Pada aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan sosialisasi, workshop, rapat koordinasi, dan penyampaian informasi mengenai Kurikulum Merdeka kepada seluruh tenaga pendidik. Namun demikian, masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam memahami penyusunan perangkat ajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan sistem asesmen. Menurut Edwards III (1980), komunikasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan. Apabila informasi yang diterima belum dipahami secara utuh oleh pelaksana, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu et al. (2022) yang menyatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan proses sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar guru mampu memahami perubahan paradigma pembelajaran secara menyeluruh. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Fatah (2023) yang menemukan bahwa kesiapan guru menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan.

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik di SMK Bina Potensi relatif telah mencukupi, namun kualitas kompetensi guru masih memerlukan peningkatan melalui pelatihan yang berkesinambungan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana praktik masih menjadi kendala dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek sebagaimana karakteristik Kurikulum Merdeka. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Mujab et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas pembelajaran dan kompetensi guru masih menjadi hambatan utama implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah. Demikian pula, penelitian Sasmitha et al. (2023) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan memanfaatkan media pembelajaran sesuai karakteristik kurikulum baru.

Pada aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru memiliki sikap yang positif terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Komitmen pelaksana terlihat dari kesediaan mengikuti pelatihan, menyesuaikan perangkat pembelajaran, serta mendukung perubahan sistem pembelajaran di sekolah. Edwards III (1980) menyatakan bahwa disposisi berkaitan dengan komitmen, motivasi, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif akan lebih mudah menerima perubahan sehingga tujuan kebijakan lebih mudah diwujudkan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi Kurikulum Merdeka. Kondisi tersebut juga sejalan dengan penelitian Rahayu et al. (2022) yang menegaskan bahwa

keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan perubahan pembelajaran.

Selanjutnya, pada aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan telah berjalan dengan cukup baik. Koordinasi internal dilakukan melalui rapat rutin sehingga setiap pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, fungsi monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka masih belum dilaksanakan secara optimal. Menurut Edwards III (1980), struktur birokrasi yang efektif memerlukan pembagian tugas yang jelas disertai mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengetahui berbagai hambatan implementasi sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan Fatah (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK tidak hanya ditentukan oleh kesiapan guru, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi organisasi dan sistem evaluasi yang dilakukan sekolah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah berjalan dengan cukup baik, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan terutama pada aspek komunikasi teknis, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi. Keempat indikator implementasi menurut Edwards III saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan telah didukung oleh adanya sosialisasi, koordinasi internal, komitmen kepala sekolah dan guru, serta pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum berlangsung secara optimal. Kendala utama masih ditemukan pada aspek komunikasi teknis, terutama dalam pemahaman guru terhadap penyusunan perangkat ajar dan sistem asesmen, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Selain itu, fungsi monitoring dan evaluasi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen pelaksana kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta penguatan mekanisme koordinasi dan evaluasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di masa mendatang.

REFERENSI

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fatah, A. (2023). Kesiapan SMK negeri dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 5(1), 95–109. <https://doi.org/10.21831/jpvo.v5i1.55862>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mujab, S., Rosa, A. T. R., & Gumelar, W. S. (2023). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka (Studi kasus SMK Al Huda Kedungwungu Indramayu). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1538–1545. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11166>
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>
- Sasmitha, W., Utomo, S. W., & Yusdita, E. E. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran akuntansi keuangan dan lembaga di SMK PGRI Wonoasri. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 21(2), 62–70. <https://doi.org/10.21831/jpai.v21i2.65274>